

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya pada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil di *download* dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menilai laporan keuangan Pemerintah Daerah banyak yang bermasalah bahkan tidak layak audit. Permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah dengan boros yang tidak jelas keperluannya. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan juga mengkritik keandalan laporan keuangan Pemda masih sangat rendah (indosiar.com, Sabtu 10 Januari 2015).

Menurut Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) Kasus yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung yakni laporan keuangan yang disajikan tidak lengkap dan pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib. Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerahnya, karena laporan keuangan yang disajikan tidak bisa dijadikan bahan perbandingan untuk menyusun laporan keuangan periode anggaran berikutnya (balebandung.com, Selasa 13 Maret 2015).

Kasus lainnya juga terjadi Pemkot Padang menyangkut masalah pengelolaan dana bergulir yang belum dilunasi. Pihak BPK mengingatkan agar kewajiban tersebut bisa segera dilunasi. BPK juga mencatat adanya salah penganggaran belanja modal di PU dan catatan tentang adanya pembayaran personil unsur Muspida yang membebani anggaran daerah. Kondisi ini tentunya akan menghambat penyusunan laporan keuangan periode berikutnya, karena laporan keuangan yang disajikan tidak bisa dijadikan bahan perbandingan untuk

menyusun laporan keuangan periode anggaran berikutnya. (www.inilah.com, Kamis, 11 Juli 2016 01:37).

Teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan instansi. Teknologi informasi merupakan fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan menyebarkan informasi, yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Teknologi informasi mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seorang dalam menghemat waktu maupun tenaga.

Penggunaan teknologi informasi tidak lepas dari risiko-risiko yang ada baik kesalahan yang disengaja seperti penipuan, tindak kebohongan untuk mendapatkan keuntungan dan tidak disengaja seperti salah memasukan nama atau kode transaksi atau lainnya. Untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut dan mendapatkan hasil akhir yang baik, penggunaan teknologi informasi akuntansi sebaiknya dilengkapi dengan pengendalian internal, pengendalian internal dibutuhkan sebagai pedoman atau batasan-batasan yang diterapkan oleh pihak instansi untuk meminimalkan risiko-risiko yang mungkin terjadi terkait dengan penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan dari instansi tersebut (Aviana, 2012).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2013), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk

menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 520 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2015 menemukan 1.427 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.871 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar, dengan total kerugian sebanyak 1,17 triliun. BPK juga telah melakukan audit atas LKPD selama lima tahun, dari tahun 2010-2015.

BPK memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seperti yang terjadi pada Kabupaten Bandung. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015. Pada tahun 2013 Kabupaten Bandung mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), tahun 2014 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tahun 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung (yang mendapatkan status *disclaimer* dari BPK merupakan sebuah kemunduran karena dari dulu Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) (Pikiranrakyat.com, 2014). Tentu saja dalam hal ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat (www.bpk.go.id, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015)

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, seperti ditunjukkan oleh hasil penelitian dari:

1. Penggunaan teknologi informasi yang diteliti oleh As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014), Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015), Hendra Wansyah (2012), Arina Roshanti, dkk (2014) dan Yofi Elfinsa Prasetyo (2015).
2. Sistem pengendalian internal yang diteliti oleh penelitian As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014), Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015), Teuku Fahrian Nagor, dkk (2015), Arina Roshanti, dkk (2014), Ahmad Faishol (2016), Tuti Herawati (2014).
3. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang diteliti oleh As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) dan Teuku Fahrian Nagor, dkk (2015).
4. Kompetensi SDM yang diteliti oleh penelitian As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014), Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015).
5. Kapasitas SDM yang diteliti oleh Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015), Hendra Wansyah (2012) dan Arina Roshanti, dkk (2014).
6. Rekonsiliasi yang diteliti oleh Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015).

7. Peran PPK-SKPD yang diteliti oleh Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015).

Berikut ini merupakan tabel faktor-faktor penelitian terdahulu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1.1
Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Nama Peneliti/Thn	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	Sistem Pengendalian Internal	Kompetensi SDM	Kapasitas SDM	Penggunaan Teknologi Informasi	Rekonsiliasi	Peran PPK-SKPD
1. As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014)	√	√	√	-	√	-	-
2. Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015)	-	√	√	√	√	√	×
3. Teuku Fahrian Nagor, dkk (2015)	√	√	-	-	-	-	-
4. Hendra Wansyah (2012)	-	-	-	√	√	-	-
5. Arina Roshanti, dkk (2014)	-	√	-	√	√	-	-
6. Ahmad Faishol (2016)	-	√	-	-	-	-	-
7. Tuti Herawati (2014)	-	√	-	-	-	-	-
8. Yofi Elfinsa Prasetyo (2015)	-	-	-	-	√	-	-

Keterangan:

- √ = Berpengaruh signifikan
- × = Tidak Berpengaruh Signifikan
- = Tidak Diteliti

Penelitian yang telah dilakukan oleh As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) dengan judul: pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Hasilnya kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan, penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Besarnya pengaruh keempat variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 45,3%.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015) dengan judul: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PKK - SPKPD tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Teuku Fahrian Nagor, dkk (2015) dengan judul: Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat (Studi pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat). Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern dan penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah baik

secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Penelitian Hendra Wansyah (2012) dengan judul: Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Secara simultan, pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian Arina Roshanti, dkk (2014) dengan judul: Pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan sistem Pengendalian intern terhadap informasi pelaporan Keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Faishol (2016) dengan judul: Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan). Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan antara variabel sistem pengendalian intern terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Tuti Herawati (2014) dengan judul: Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yofi Elfinsa Prasetyo (2015) dengan judul: Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi Akuntansi (Survey Pada UMKM Sentra Industri Sepatu Cibaduyut Bandung Jawa Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi informasi terbukti berpengaruh dalam upaya meningkatkan kualitas informasi akuntansi melalui kualitas sistem informasi akuntansi pada UMKM sentra industri sepatu Cibaduyut Bandung.

Penelitian ini merupakan gabungan dari tiga penelitian terdahulu yakni penelitian Ahmad Faishol (2016), Tuti Herawati (2014) dan Yofi Elfinsa Prasetyo (2015). Sedangkan penelitian dari As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014), Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015), Teuku Fahrian Nagor, dkk (2015), Hendra Wansyah (2012), Arina Roshanti, dkk (2014) dijadikan sebagai referensi. Penulis menggunakan penelitian terdahulu tersebut dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan karena adanya beberapa persamaan. Selain terdapat

persamaan, penelitian ini juga mempunyai beberapa perbedaan dengan dua penelitian di atas, yaitu:

Tabel 1.2
Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Objek Perbedaan	Ahmad Faishol (2016)	Tuti Herawati (2014)	Yofi Elfinsa Prasetyo (2015)
Variabel Independen	Sistem pengendalian internal	Sistem pengendalian internal	Teknologi Informasi
Tempat Penelitian	SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Cianjur	UMKM Sentra Industri Sepatu Cibaduyut Bandung JawaBarat
Unit Analisis	Pegawai bagian keuangan	Inspektorat Daerah yang membina dan mengawasi OPD	577 orang pengusaha di sentra industri cibaduyut bandung jawa barat.
Teknik Sampling	<i>Purposive sampling</i>	<i>Purposive sampling</i>	<i>Random Sampling</i>
Jumlah sampel	71	31	80

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul : **”Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung masih mendapatkan status *disclaimer* dari BPK
- 2) Transaksi yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya
- 3) Penggunaan teknologi informasi yang mendukung keandalan laporan keuangan masih terbatas
- 4) Sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan masih lemah

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan teknologi informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
2. Bagaimana sistem pengendalian internal di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
4. Seberapa besar pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

5. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penggunaan teknologi informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
2. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal di Pemerintah daerah Kabupaten Bandung
3. Untuk menganalisis kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi terutama dalam penerapan pengendalian internal, penggunaan TI serta kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai besar pengaruh penggunaan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan instansi

b. Bagi Instansi

Sebagai salah satu sumbang pikiran dan alat penilaian agar teknologi informasi dan pengendalian internal dalam suatu instansi dapat berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan instansi

c. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penggunaan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan instansi dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang berlokasi di Komplek Pemda Kabupaten Bandung, JL. Raya Soreang, Km. 17, Pamekaran, Soreang, Bandung, Jawa Barat 40912.